

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS KEWIRAUSAHAAN DI SULAWESI SELATAN

THE EMPOWERMENT MODEL OF COASTAL COMMUNITY BASE ON ENTREPRENEURSHIP IN SOUTH OF SULAWESI

Muhammad Tamar

Staf Pengajar Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Abstrak

Model intervensi pemberdayaan masyarakat pesisir yang berbasis kewirausahaan sebagai salah satu alternatif program pengentasan kemiskinan, merupakan model pemberdayaan berbasis komunitas, yang bermartabat, berterima, berkolaborasi, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat pesisir dalam upaya memberdayakan dirinya adalah menemukan mata pencaharian alternatif (selain melaut) yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga mereka, mengisi kekosongan waktu luang dengan usaha alternatif yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Desain pemberdayaan yang dirancang untuk semua kelompok adalah 'model pemberdayaan diri siap usaha' dengan fokus utamanya adalah bagaimana merubah sikap hidup, merubah mind-setting, merencanakan hidup dengan usaha kreatif secara kolaboratif, dengan harapan mereka bisa membangkitkan semangat untuk berdaya-usaha (wirausaha)

Kata kunci : Pemberdayaan, masyarakat pesisir, kemsikinan, perubahan sikap dan kewirausahaan

Abstract

The model of the coastal community empowerment interventions based entrepreneurship as an alternative poverty alleviation programs, as A model of community empowerment in the effort to community-based poverty reduction, a dignified, grateful, collaboration and sustainable. According to the results of the need of assessment at both locations can be concluded that the needs of coastal communities in an effort to empower themselves is to find alternative livelihoods (other than fishing) is expected to increase their family income , to filled up the spare time with alternative business in accordance with state and local requirements Empowerment model that has designed to all the groups is 'ready for business self-empowerment model! whith the main focus is how to change attitudes, change the mind-set, planned to live with a collaborative creative effort: in the hope they can generate enthusiasm for the power-business (entrepreneurial).

Key words : Empowerment, coastal community, poverty, changes of attitude and entrepreneurship.

PENDAHULUAN

Kewirausahaan merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu bangsa. Kewirausahaan adalah seperangkat tingkah laku (common trait) yang meliputi tingkah laku instrumental, prestatif, luwes bergaul, kerja keras, mempunyai keyakinan diri, mampu mengambil

resiko, swa-kendali, inovatif dan kemandirian yang dimiliki oleh individu (Sukardi, 1991 : Tamar, 1994, 2000, 2004, 2007: Dwi Ryanti, 2001). Sifat kewirausahaan saat ini menjadi orientasi kemajuan dalam berbagai lapangan kehidupan. Mc Clelland (1961) menyatakan bahwa tingkat kemajuan suatu bangsa sangat

tergantung pada proporsi anggota masyarakat yang bersentuhan dengan kewirausahaan, karena itu merupakan modal penting dalam memajukan perekonomian (Solvell, Lindqvist & Ketels, dalam Kasali 2003).

Yang menjadi persoalan utama saat ini adalah bagaimana cara meningkatkan sifat kewirausahaan suatu bangsa. Berbagai metode telah diuji-coba untuk maksud tersebut, dan yang paling terkenal AMT (achievement motivation training) yang diperkenalkan oleh McClelland (1972). Sejumlah Negara berkembang sudah mengadopsi program tersebut termasuk Indonesia, walaupun hasilnya belum dapat dirasakan secara langsung, tapi secara tidak langsung berdampak terhadap trend untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan dalam masyarakat. Oleh karena itu sebagai pembelajar, peneliti berusaha membuat terobosan baru untuk mendukung program pengentasan kemiskinan yang berbasis kewirausahaan dengan asumsi bahwa persoalan kemiskinan adalah persoalan mendasar yang meliputi sejumlah besar warga negara Indonesia memerlukan penanganan secara serius dan berkesinambungan. Berbagai program pemberdayaan masyarakat miskin yang telah dilakukan, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat ternyata belum berdampak secara signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan dalam masyarakat.

Ada kecendrungan program yang ditawarkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin tersebut berupa 'ikan', yang langsung dapat dipergunakan (konsumtif) sehingga ketika ikan tersebut habis, mereka kembali lagi seperti biasa (miskin). Hal ini terjadi karena yang merancang program tersebut menganggap bahwa kemiskinan bisa diatasi ketika ada

pihak lain yang mengasihani atau dengan kata lain orang miskin adalah obyek yang tidak berdaya sehingga memerlukan bantuan pihak lain.

Program yang ditawarkan dalam studi ini berupa kail' dan keterampilan mempergunakan kail tersebut agar mereka punya upaya (effort) untuk keluar dari persoalan kemiskinan yang mereka hadapi dengan pemberdayaan diri siap usaha. Program pemberdayaan yang ditawarkan ini berasumsi bahwa kemiskinan adalah persoalan yang dihadapi seseorang dalam hidupnya karena 'terperangkap' dalam situasi yang kurang menguntungkan dan mereka tidak tahu jalan keluar dari perangkap tersebut, oleh karena itu pihak yang memberi bantuan seyogyanya membantu mereka mencari jalan keluar dari perangkap 'kemiskinan' dengan memberdayakan mereka agar dapat menemukan solusi yang tepat bagi dirinya. Program ini menempatkan orang miskin sebagai subyek yang perlu diberdayakan agar mereka mempunyai kekuatan untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang mereka hadapi, pihak-pihak yang memberi bantuan bertindak sebagai fasilitator dan bertugas mendampingi mereka sampai bisa mandiri.

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian awal ini adalah membuat rancangan model pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan, yang akan ditindaklanjuti dengan program pelatihan dan pendampingan pembuatan proposal usaha berbasis kebutuhan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan

Terjadinya kegagalan pada model pembangunan pada masa lalu, menyadarkan akan perlunya reorientasi baru dalam pembangunan, yaitu pendekatan pem-

Pemberdayaan, masyarakat pesisir, bangunan yang memperhatikan lingkungan dan pembangunan yang berwajah manusiawi. Pendekatan tersebut menempatkan manusia sebagai faktor kunci yang memainkan peran penting dalam pembangunan atau dengan kata lain manusia sebagai subyek utama dari pembangunan tersebut, jadi berorientasi humanistik.

Bertolak dari model pembangunan yang humanistik tersebut maka dibutuhkan program-program pembangunan yang memberikan prioritas pada upaya memberdayakan masyarakat. Dalam konteks Good Governance ada tiga pilar yang harus menopang jalannya proses pembangunan, yaitu masyarakat sipil, pemerintah dan swasta. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia (SDM)/ masyarakat menjadi pilar utama dalam proses tersebut.

Dalam pembangunan perekonomian, upaya untuk memberdayakan rakyat hendaklah disertai transformasi secara seimbang, baik itu transformasi ekonomi, sosial, budaya maupun politik, sehingga akan terjadi keseimbangan antara kekuatan ekonomi, sosial dan budaya dalam proses transformasi tersebut. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dengan memberikan hak untuk mengelola segenap potensi dan sumberdaya yang mereka miliki. Masyarakat miskin diberikan kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Dengan demikian masyarakat diberi kekuasaan untuk mengelola dana sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain.

Menurut Winarni dalam Sulistiyani (2004:79), inti dari pemberdayaan ada tiga hal, yaitu pengembangan (enabling). memperkuat potensi atau daya (empokemsikinan, perubahan sikap dan kewirausahaan

wering), dan terciptanya kemandirian. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi masyarakat tidak menyadari, atau bahkan belum mengetahui. Oleh karena itu, potensi sumber daya harus digali, dan kemudian di-kembangkan secara aktual.

Berdasarkan asumsi tersebut maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi semangat kemandirian.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi. Tentunya dengan mempergunakan segenap daya kemampuan afektif, kognitif, konatif dan psikomotorik yang mereka miliki dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Kondisi kognitif adalah kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu perilaku yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah sense yang dimiliki

oleh masyarakat yang diharapkan untuk diintervensi dalam mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kondisi psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan pembangunan.

Terjadinya keberdayaan dalam empat aspek tersebut akan memberikan kontribusi pada tercapainya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, dimana dalam masyarakat akan terjadi peluasan wawasan, pengembangan kecakapan keterampilan, penguatan rasa memerlukan (sense of need) pembangunan/perubahan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut: secara keseluruhan akan memotivasi masyarakat untuk terus maju dan beraktualisasi diri.

Tahap — Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kesadaran tinggi.
- b) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
- c) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kemandirian.

Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Usaha/bisnis merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan. Selain untuk mendapatkan keuntungan, usaha dijalankan juga untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan “usaha, baik dalam jangka panjang ataupun dalam waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu sebuah usaha harus dikelola dengan baik.

Maka dalam konsepsi pemberdayaan masyarakat, mengawali pemberdayaan melalui kewirausahaan adalah hal yang penting dilakukan. Hal ini untuk memberdayakan bidang-bidang yang lain setelah pemberdayaan dalam bidang ekonomi. Karena pada masyarakat miskin, masalah utama adalah masalah perekonomian keluarga atau kampung yang menyebabkan mereka tidak berdaya baik secara social, kesehatan maupun politik. Pada masyarakat miskin konsentrasi tertinggi tertuju bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Mereka akan serius dan akan mengikuti secara penuh terhadap hal-hal yang terkait dengan perbaikan perekonomian. Kewirausahaan merupakan pilihan strategis terhadap pemberdayaan masyarakat miskin.

Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, perubahan perubahan pola kehidupan masyarakat yang mengarah kepada hal-hal yang positif merupakan pencerminan masih di miliknya

etos kerja yang unggul. Peremberdayaan, masyarakat pesisir, kemiskinan, perubahan sikap dan kewirausahaan

beda kadar perubahan antara interaksi satu dengan lainnya sangat tergantung pada aktifitas individu dan interaksi kepada lingkungannya. Begitu pula halnya dalam pembinaan sikap kewirausahaan merupakan upaya sistematis dan berencana agar sikap mental wirausaha dapat ditanamkan dalam diri generasi muda melalui suatu proses. Proses perubahan itulah yang dikembangkan melalui suatu pendekatan psikologis yaitu belajar sosial.

Dari berbagai karakteristik tingkah laku kewirausahaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Timmons (1987), Swasono (1976), maupun yang dikemukakan dalam buku E.D.R (Entrepreneur Discovery and Development Progress of Action Research EWC, 1977). Sukardi (1991), Tamar (1994) menyimpulkan sembilan tingkah laku kewirausahaan, yaitu :

- a) Instrumental
- b) Prestatif
- c) Keluwesan Bergaul
- d) Kerja Keras
- e) Keyakinan Diri
- f) Pengambilan Resiko
- g) Swa-Kendali (Personal Control)
- h) Inovatif
- i) Kemandirian

Karakteristik tingkah laku kewirausahaan telah dilakukan studi secara mendalam oleh Sukardi (1991) dan berkesimpulan bahwa kesembilan karakteristik tersebut merupakan karakteristik tingkah laku kewirausahaan. Tingkah laku kewirausahaan tersebut merupakan “common trait” yang dimiliki oleh wiraswastawan. Dalam studi lebih lanjut dari para ahli dikemukakan bahwa karakteristik tingkah laku tersebut tidak

mutlak hanya dimiliki oleh Wirausahawan tetapi mempunyai peluang pada semua orang yang berhasil dalam menjalankan tugasnya, seperti manajer, birokrat, ilmuwan, dan sebagainya, karena karakteristik tingkah laku tersebut menunjukkan karakteristik pribadi yang mempunyai sumbangan yang bermakna terhadap unjuk kerja seseorang (Tamar, 1994, 2004, 2007 : Dwiriyanti, 2002).

METODE PENELITIAN

Secara keseluruhan desain penelitian ini bersifat eksperimen lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sebagai langkah awal dilakukan studi analisis situasi dan analisis kebutuhan kelompok masyarakat miskin yang menjadi subyek penelitian, dengan target yang ingin dicapai adalah membuat desain model intervensi pemberdayaan diri siap usaha. Oleh karena itu menggunakan teknik PRA (participatory rural appraisal) dalam pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan FGD (focus group discussion). Sumber data adalah warga masyarakat miskin yang menjadi subyek penelitian. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar. yakni Desa Mattiro Baji Kecamatan Liukang Topabbiring Kabupaten Pangkep dan Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Semua data yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan FGD, diolah dan dianalisis dengan content analysis. Dalam proses pengolahan dan analisis data dilakukan triangulasi (croscek) dengan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat untuk memastikan validitas data yang terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resume Hasil PRA/FGD

Dari hasil diskusi dengan masyarakat, khususnya di Desa Mattiro Baji Pangkep dapat diketahui bahwa menyangkut potensi pengelolaan sumberdaya desa khususnya yang berkaitan dengan terumbu karang terungkap bahwa potensi sumberdaya terumbu karang di daerah ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari berbagai pihak. Secara teoritis mereka tidak mengerti konsep Daerah Perlindungan Laut. Namun keinginan mereka untuk menjaga terumbu karang relatif tinggi dengan asumsi bahwa terumbu karang sebagai rumah ikan. Menurut mereka sebaiknya ada pembagian wilayah di daerah mereka untuk kepentingan penangkapan tanpa harus mengganggu wilayah karang yang ditunjuk sebagai wilayah terumbu karang yang dijaga. Selain itu, mereka menganggap penting untuk membuat tanda-tanda disekitar wilayah tersebut dan yang paling penting adalah keberadaan aparat yang memiliki kemampuan untuk mengawasi wilayah tersebut agar tidak dimasuki nelayan luar pulau/desa yang ingin merusak di daerah mereka. Untuk kepentingan jangka panjang dibutuhkan pemberdayaan warga masyarakat di daerah pesisir agar dapat meningkatkan kesejahteraannya yang sejalan dengan upaya perbaikan lingkungan sekitarnya.

Khususnya di Desa Laikang Takalar, berdasarkan hasil FGD dengan kelompok-kelompok masyarakat, dapat diketahui bahwa menyangkut potensi pengelolaan sumberdaya desa khususnya yang berkaitan dengan rumput laut, pada umumnya warga desa sudah menggantungkan hidupnya dari budi daya rumput laut tersebut. Namun persoalan mendasar yang dialami masyarakat adalah musim yang

cocok untuk budi daya rumput laut walaupun dikatakan sepanjang tahun, tetapi masa produktivitasnya yang baik antara Bulan Nopember s/d Bulan Mei: dan di antara Bulan Mei ke Bulan Nopember keadaan mata pencaharian pokok masyarakat tidak stabil, karena bertepatan dengan musim kemarau. Hal yang paling mendasar dari kehidupan masyarakat Laikang adalah pola hidupnya yang cenderung “konsumtif karena tidak mengenal “tabungan modal usaha’: hal ini terlihat dari pola penggunaan uang ketika mereka selesai panen, mereka seakan berlomba membeli barang yang dianggap memiliki nilai “gengsi’ seperti perabotan yang bagus, kendaraan, tanpa menyimpan modal kerja. Nanti setelah tiba masanya untuk menanam rumput laut meminjam lagi ke kreditor (Ponggawa atau POKMAS yang memfasilitasi kredit usaha), sehingga pola hidupnya begitu sepanjang tahun. Ketika terjadi masa peceklik (gagal panen) dan tidak bisa melaut karena musim biasanya mereka menggadaikan barang-barangnya seperti sepeda motor atau meminjam ke kreditor lagi. Kondisi demikian yang membuat perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat seakan tidak banyak mengalami perubahan.

Hal yang terkait dengan kondisi wilayah pesisir seperti terumbu karang, mereka mengungkapkan potensi sumberdaya terumbu karang di daerah ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari berbagai pihak. Masyarakat Laikang secara teoritis tidak mengerti konsep Daerah Perlindungan Laut. Namun keinginan mereka untuk menjaga terumbu karang relative tinggi dengan asumsi bahwa terumbu karang sebagai rumah ikan. Menurut mereka sebaiknya ada pembagian wilayah di daerah mereka untuk kepentingan penangkapan tanpa harus mengganggu

wilayah karang yang ditunjuk sebagai wilayah terumbu karang yang dijaga. Selain itu, mereka menganggap penting untuk membuat tanda-tanda disekitar wilayah tersebut dan yang paling penting adalah keberadaan aparat yang memiliki kemampuan untuk mengawasi wilayah tersebut agar tidak dimasuki nelayan luar pulau/desa yang ingin merusak di daerah mereka.

Sedangkan yang berkaitan dengan mangrove: yang pada mulanya sepanjang pesisir Desa Laikang dahulunya adalah hutan mangrove, namun setelah dieksploitasi oleh masyarakat karena pembukaan lahan empang hingga saat ini hutan mangrove tinggal sedikit yang terjamah. Walaupun hal tersebut sudah mulai disadari oleh masyarakat terhadap pentingnya bakau setelah mereka mulai kesulitan dalam menangkap ikan karena populasinya yang berkurang. Tetapi belum begitu diperhatikan oleh masyarakat karena dianggap halangan dalam mengelola budidaya rumput laut.

Berdasarkan hasil FGD (diskusi terfokus) dengan masyarakat, terungkap beberapa permasalahan atau isu berikut:

Isu yang terkait dengan Pemanfaatan Sumberdaya Laut

Penurunan Kapasitas (jumlah populasi ikan) dalam jumlah yang cukup besar, disebabkan :

- 1) Penangkapan ikan yang destruktif dengan mengabaikan keselamatan lingkungan, seperti penggunaan *Trawl mini*
- 2) Penangkapan jenis komodity Ekonomis tinggi "dan pasarnya jelas (seperti kepiting dan udang) yang mengakibatkan Over Fishing, Pertambahan Jumlah Penduduk (jumlah nelayan meningkat) tanpa di-

barengi penciptaan selain melaut, lapangan kerja

- 4) Masih rendahnya minat dan pengetahuan masyarakat untuk melakukan kegiatan Budidaya dilaut,
- 5) Penangkapan Ikan Hias yang tidak sesuai prosedur,
- 6) Belum adanya aturan yang tegas dalam mengatur jalur penangkapan bagi nelayan
- 7) Perlunya jaminan keamanan zonasi pengelolaan Sumberdaya yang disepakati dari pemanfaatan oleh pihak diluar Desa Mattiro Baji Pangkep.

Isu yang berkaitan dengan Ekosistem Lingkungan

Penurunan jumlah dan mutu terumbu karang serta organisme perairan yang disebabkan oleh :

- 1) Penurunan jumlah dan mutu terumbu karang dan organisme perairan karena penggunaan alat tangkap destruktif (bom dan bius), penambatan perahu (pembuangan jangkar dan penambangan karang untuk keperluan bangunan
- 2) Limbah Industri Semen (di Pangkep) yang terbawa arus sungai yang mengakibatkan perairan laut dekat muara menjadi keruh.
- 3) Erosi yang mengakibatkan banyaknya Lumpur dari aliran sungai
- 4) Penambangan karang untuk bangunan
- 5) Terjadinya abrasi di beberapa tepian Pantai
- 6) Pembuangan limbah rumah tangga dan hasil perikanan secara sembarangan

- 7) Tidak adanya sarana pembuangan sampah
- 8) Rusaknya areal penyangga (karang padabagian tubir pulau) sebagai pemecah ombak sehingga meningkatkan proses abrasi
- 9) Ketergantungan kelompok pengawas pada ketersediaan fasilitas untuk pengawas dalam melakukan kegiatan/tugas mereka

Isu yang berkaitan dengan Keadaan Sosial dan ekonomi

Lemahnya Kapasitas Sumberdaya Manusia dan masih rendahnya taraf hidup masyarakat disebabkan :

- 1) Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat,
- 2) Pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif.
- 3) Ketergantungan pada pola tengkulak yang dilakukan oleh Punggawa
- 4) Ketergantungan nelayan terhadap kondisi alam (musim dan cuaca).
- 5) Kenaikan BBM yang mengakibatkan penurunan kapasitas tangkap bagi nelayan
- 6) Ketergantungan pada musim dan kondisi cuaca
- 7) Belum berkembang pengetahuan masyarakat akan mata pencaharian alternatif , Kegiatan budi daya, pasca panen dan pengolahan hasil.

Isu yang berkaitan dengan Kelembagaan - Masyarakat

Belum berfungsinya sistem kelembagaan yang ada utamanya dalam menjalankan fungsi-fungsi dari sistem yang diterapkan dalam hal koordinasi antara pelaksana maupun antar lembaga/institusi

- 1) Masih lemahnya kapasitas unsur-unsur pelaksana kelembagaan .
- 2) Belum optimalnya manajemen kelembagaan
- 3) Tidak adanya transparansi kelembagaan yang ada.
- 4) Lembaga yang ada sangat bergantung pada bantuan pemerintah,
- 5) Belum efektifnya pelaksanaan fungsi kelompok masyarakat dan organisasi kepemudaan dalam tatanan kelembagaan desa yang disebabkan oleh kurangnya pengertian akan fungsi kelompok dalam masyarakat dan belum tertata struktur yang optimal dari seluruh unsur-unsur pokmas dan lembaga desa.

Rencana Tindak Lanjut

Sebagai langkah awal dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Program Pengembangan Diri Siap Usaha dilakukan pembentukan kelompok masyarakat pada dua desa yang terpilih. Adapun kelompok masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Kelompok Masyarakat di Desa Mattiro Baji

No	Nama Kelompok	Alternatif Rencana Usaha	Ketua & Anggota Usaha Kelompok
1	Kelompok Lestari	Penangkaran dan Budidaya Ikan Hias	Ketua Kelompok : Hasanuddin
2	Kelompok Gender Pasir Putih	Handyeraft dan home industry	Ketua Kelompok : Ida
3	Kelompok Nelayan Pancing Mamminasae	Budidaya Ikan dalam Keramba	Ketua Kelompok : Mudo
4	Kelompok Nelayan Rumpon Sipakainga	Budidaya Rumput Laut	Ketua Kelompok : Arsyad
5	Kelompok Pertukangan Lestari Bahari	Home industry	Ketua Kelompok : Ma'mun

Tabel 2. Kelompok Masyarakat di Desa Laikang

No	Nama Kelompok	Alternatif Rencana Usaha	Ketua & Anggota Usaha Kelompok
1	Mitra Pesisir Puntondo	Budidaya Rumput laut dan Budidaya abalone (kerang)	Ketua Kelompok : Tabe Dg Sese
2	Minasa Te'ne Laikang	Budidaya Rumput laut dan Keramba	Ketua Kelompok : Risno Siswanto
3	samboritta Ongkoa	Budidaya Rumput laut dan Keramba	Ketua Kelompok : N Dg Rangka
4	Kelompok Gender	Keripik Sukun dan Panganan Lokal	Ketua Kelompok : Kamasia
5	Kelompok Handyeraft	Kerajinan Tangan : Cindramata	Ketua Kelompok : Santi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil FGD kelompok masyarakat pesisir dapat diidentifikasi peta permasalahan yang dihadapi secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 4 permasalahan pokok, yakni : (a) menurunnya kapasitas sumber daya laut karena tidak adanya keseimbangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil laut (eksploitasi) dengan daya dukung lingkungan, (b) semakin rusaknya ekosistem laut seperti hancurnya terumbu karang, erosi, abrasi, pendangkalan, dan polusi

perairan laut akibat buangan limbah, (c) rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh faktor pendidikan dan kemampuan mengembangkan diri dengan berbagai keterampilan yang memungkinkan mereka keluar dari "kotak? ketakberdayaan karena hanya tergantung pada alam, dan (c) tidak berfungsinya kelembagaan masyarakat yang ada, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang difasilitasi oleh LSM.

Hasil FGD dalam merumuskan program skala prioritas untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, muncul sejumlah program

yang menurut pandangan masyarakat pesisir sebagai alternatif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Namun yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat pesisir yang paling menonjol adalah kesadaran mereka untuk menemukan mata pencaharian alternative (selain melaut di Mattiro Baji dan masa tanam-panen rumput laut di Laikang). Untuk itu mereka membutuhkan sejumlah pelatihan keterampilan seperti pengelolaan rumput laut, pembesaran dan pemeliharaan ikan dalam keramba, pemanduwisata dan pemandu selam (bagi kelompok pemuda), penangkaran dan budidaya ikan hias, pengelolaan pasca panen ikan (pengasapan, pengeringan, abon ikan, bakso ikan, nugget ikan, kerupuk ikan, dsb), pembuatan panganan lokal (kripik sukun, dodol rumput laut, makanan tradisional, dsb), pengembangan pertukangan dan handyeraft. Untuk mendukung usaha-usaha yang mereka usulkan dibutuhkan dukungan modal usaha dengan sistem pengelolaan keuangan yang sederhana (seperti lembaga keuangan mikro, BMT, dan simpan pinjam).

SARAN

Pemberdayaan masyarakat pesisir memerlukan pendekatan yang holistik, oleh karena itu dibutuhkan perencanaan secara terpadu yang berbasis masyarakat pesisir. Dengan memahami kondisi nyata yang dihadapi masyarakat pesisir dapat dirumuskan strategi pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungannya.

Banyaknya kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat pesisir memerlukan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir agar mereka bisa bangkit untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Pihak-pihak yang terkait seyogyanya memb-

erikan ulur tangan untuk membantu tetapi bukan dalam konteks 'belas-kasihan' sehingga mereka terbuai.

Desain pemberdayaan yang ditawarkan melalui program ini perlu diuji-coba efektifitasnya terhadap perubahan sikap kewirausahaan masyarakat, makanya diperlukan studi lebih lanjut dari penelitian Ini.

DAFTAR PUSTAKA

ADB, _____ 1999. Fighting Poverty in Asia and the Pacific: The Poverty Reduction Strategy of the Asian Development Bank (Mimeo)

An-Naf, Julissar, 2008. Pengentasan kemiskinan sebagai sasaran strategis pembangunan di Indonesia. An-Naf Blogger, google.com.

Abd. Kabir, Muin, 2007. Pengentasan kemiskinan dan ekonomi global. Google.com/kemiskinan.

BPS, _____ 2007, Tingkat kemiskinan di Indonesia, Berita statistiK edisi 2 Juli.

Dwi Riyanti, Benedicta Prihatin, 2003. Kewirausahaan : dari sudut pandang psikologi kepribadian, Grasindo, Jakarta.

Kasali, Rhenald, 2003. Social Capital, Trust dan Entrepreneurship : Suatu Pendekatan Ekonomi Makro untuk Mencapai A Balanced Society, Usahawan No. 11 Tahun XXXII Nopember, Jakarta.

Lee, Sang M. & Peterson, Suzanne J., 2000. Culture, — entrepreneurial orientation, and global compe-tifiveness. Journal of World Business. Greenwich Winter, vol. 35. Iss4. p9.401.

Sumardi, M, & Hans-Dieter Evers 1999. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. Rajawali Pers, Diterbitkan untuk Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.

Tamar, Muhammad, 2004. Model pengembangan sikap kewirausahaan berbasis budaya lokal : studi terhadap etos Kerja pada sistem nilai budaya Bugis dalam pembinaan sikap kewirausahaan generasi muda di Sulawesi Selatan, Laporan penelitian Hibah XII/I. Lembaga Penelitian Unhas, Makassar.

_____, 2007. Pengaruh sistem nilai budaya lokal, nilai motivasional dan sifat kewirausahaan terhadap

keberhasilan — pengusaha Bugis. Disertasi — Program Pascasarjana Psikologi UI, Jakarta.

The World Bank. 2006. Era baru dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. INDOVOP, Jakarta.

Timer, Sarah 2005. Nascent market capitalism under question : Inter'pretations of success among Makassar entrepreneurs, *Tijdschrift vor Economische on Sociale Geografie* vol 96, No.3, pp 264-274.

Wickham, Philip A. 2004, *Strategic Entrepreneurship*, 39 Ed. Prentice Hall, Pearson Education, Edinburgh-England.